



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 April 2020

Halaman: 9

Anggaran Bansos Capai Rp47,662 M

● Pemda DIY Usul Bantuan Sosial untuk 76.620 KK

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 76.260 Kepala Keluarga (KK) di lima Kabupaten/Kota DIY diusulkan mendapat bantuan jaminan sosial akibat pandemi Covid-19. Penerimaan bantuan ini akan dilaksanakan pada bulan April ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi menjelaskan, rencananya Kamis (9/4) hari ini, usulan tersebut akan kembali dibahas oleh Pemecintah Daerah (Pemda) DIY bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Ia menyebut, bantuan untuk 76.260 KK tersebut berbentuk sembako sebesar Rp625 ribu untuk satu KK.

"Hitungannya empat anggota keluarga. Kalau satu rumah hanya ada tiga anggota, ya itu semua sudah menjadi hak mereka yang menerima," katanya saat ditemui, Rabu (8/4).

Untung mengatakan, nominal tersebut masih usulan dari Pemda DIY. Hari ini, pihaknya baru akan mendelegasikan usulan yang diajukan. Sumber anggaran tersebut berasal dari redesign APBD DIY yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Jika dikalkulasikan anggaran per KK sebesar Rp625 ribu, dikalikan dengan 76.260 KK. "Anggaran yang

disisihkan sebesar Rp47,662 miliar. Ya kurang lebih segitu, itu masih pertimbangan. Belum disepakati, karena Kamis (hari ini) masih akan dirapatkan," ungkapnya.

Jumlah penerima bantuan tersebut bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. "Mereka ini warga yang belum sama sekali menerima bantuan baik itu BPNT maupun PKH," imbuh dia.

Skema penyaluran tersebut nantinya melalui tim Gugus Tugas tiap-tiap daerah, lalu disalurkan melalui

● ke halaman 15

Anggaran Bansos

● Sambungan Hal 9

pemerintah desa. Ia mengatakan, bantuan tersebut akan berjalan hingga masa tanggap darurat Covid-19 Nasional dicabut.

Kemungkinan besar pertengahan April ini bantuan bisa segera disalurkan. "Kalau tanggap darurat diperpanjang, ya kami redesign APBD lagi. Tapi harapannya supaya segera selesai," ujar dia.

Dasar nominal yang telah diusulkan, lanjut Untung, Pemda DIY mempertimbangkan tentang biaya kecukupan gizi untuk satu KK di wilayah DIY. "Baik itu telur, beras dan kebutuhan pokok lainnya. Maka, kami temukan angka Rp625 ribu itu," paparnya.

Dinas Sosial Kota Yogya juga mempercepat penerimaan jaminan hidup (jadup) bagi penyandang disabilitas. Ada sekitar 225 warga Kota Yogyakarta yang nantinya mendapat jadup disabilitas.

"Jadup kita percepat. Minggu depan sudah bisa

pencairan. Ada sekitar 225 orang yang dapat, naik dari tahun lalu, karena kita tambah untuk disabilitas yang terlantar," kata Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Yogyakarta, Ch Tri Maryatun, Rabu (8/4).

Dia mengatakan, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terdampak pasca merebaknya Covid-19. Mereka yang mendapat jadup adalah warga yang termasuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia melanjutkan warga disabilitas mendapat jadup sebesar Rp300 ribu per bulan, namun akan diterimakan setiap empat bulan sekali. Jadup yang diterima tidak spesifik untuk keperluan tertentu, namun harus memenuhi kebutuhan warga difabel yang menerima.

"Tidak ada ketentuan untuk membeli apa, yang penting harus digunakan

untuk kepentingan yang bersangkutan (penerima jadup). Boleh untuk membeli makanan, untuk berobat, dan lain-lain," lanjutnya.

Tepat sasaran

Dinsos Kota Yogyakarta memastikan jadup yang diberikan tepat sasaran dan dipergunakan untuk penerima jadup. Setiap kecamatan ada satu pendamping khusus yang nantinya akan memantau penggunaan jadup tersebut.

"Ada pendamping nanti yang akan memantau keuangan. Jadi ada laporan keuangannya, untuk membeli apa saja," sambungnya.

Meski penerimaan jadup disabilitas dipercepat, namun pelayanan Jamkesus harus dibatalkan. Hal itu karena dalam Jamkesus akan melibatkan banyak orang. Paling tidak ada 250 orang yang akan berkumpul untuk mengakses Jamkesus.

Pelayanan Jamkesus seharusnya dapat dilaksanakan pada April ini. Namun harus ditunda, dan akan dilaksanakan kembali sekitar November atau Desember mendatang. "Jamkesus seharusnya dua kali, yang April sebenarnya sudah kita siapkan. Tetapi untuk saat ini tidak bisa dilaksanakan, jadi kemungkinan diakhir tahun," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai menanggapi, pada prinsipnya DPRD DIY selalu mendukung langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Pemda DIY. Alasannya, Gubernur hingga kepala daerah memang diberi wewenang untuk menangani masa pandemi kali ini.

"Kami ini sifatnya hanya membuka keran. Jika ada kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Dan saya kira keputusan pemberian bantuan sejumlah Rp625 ribu itu sudah diperhitungkan dengan matang," katanya. (hda/maw)

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005